

PROSPEK MASA DEPAN TIMOR TIMUR

Ganewati Wuryandari*

ABSTRACT

Timor Timur (East Timor) has been a longtime problem for Indonesia and for its people. This is caused by the process of become Indonesia part was not so simple. The Indonesia government is not aware about this situation. In developing effort of this new province, the government of Indonesia has not been paying attention to the social and cultural aspects of the local people. It seems that those people have been exploited and their right as humans was also been violated.

I. Pendahuluan

Sejak dinyatakan sebagai Propinsi Indonesia ke 27 dua puluh tiga tahun lalu, pada kenyataannya Timor Timur telah mendatangkan berbagai masalah yang berkepanjangan bagi Indonesia. Di dalam negeri, Indonesia harus menghadapi berbagai kelompok penduduk Timor Timur yang menginginkan kemerdekaan atas tanah Loro Sae tersebut, di samping juga selalu mensubsidi sekitar 93 persen seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dibutuhkan propinsi ini. Di lain pihak, di luar negeri Indonesia juga harus menghadapi gerilya politik yang dilakukan oleh kelompok anti integrasi Ramos Horta cs, dan berbagai kritik serta kecaman dari negara-negara barat atas pelanggaran hak asasi manusia di wilayah ini. Bahkan PBB

* Peneliti pada Puslitbang Politik dan Kewilayahan -LIPI

hingga saat ini, masih memandang wilayah bekas jajahan Portugal tersebut sebagai kawasan yang belum memiliki pemerintahan sendiri (*non-self governing territory*). Artinya, integrasi wilayah Timor Timur ke dalam wilayah negara Republik Indonesia diragukan keabsahannya dan akibatnya Indonesia dianggap sebagai negara agresor.

Situasi ini pada akhirnya sering menyulitkan posisi pemerintah Indonesia. Pemerintah sering menjadi pusat perhatian dunia dan menjadi obyek kritik dari berbagai pihak, karena kejadian-kejadian yang terjadi di Timor Timur atau yang terjadi di luar pulau itu yang menyangkut masalah Timor Timur. Segala upaya untuk membangun Timor Timur ini seakan selalu ditenggelamkan oleh bertubi-tubinya citra buruk, tekanan politik dan taruhan kredibilitas. Pada kenyataannya, Indonesia dalam masalah Timor Timur ini selalu dihadapkan pada posisi yang tidak diuntungkan. Oleh karena itu, nampak wajar apabila Indonesia ingin melepaskan diri dari beban ekonomi dan politik yang dipikulnya selama 23 tahun atas Timor Timur.

Dalam konteks inilah, maka pemerintah telah mengambil ancatan-ancang untuk menyelesaikan masalah Timor Timur secara tuntas. Melalui sidang yang dilakukan pada 27 Januari 1999, Kabinet pimpinan Presiden Habibie telah mengambil keputusan yang sangat fundamental mengenai masa depan Timor Timur, yaitu untuk melepaskan wilayah tersebut jika usul mengenai pemberian status khusus dengan otonomi yang luas (*special status based on full scale autonomy*) terhadap Timor Timur tidak mencapai kesepakatan.

Dalam kaitan itu, tulisan ini akan menganalisis sejauh mana prospek masa depan Timor Timur. Untuk itu, pertama-tama akan diuraikan terlebih dahulu mengenai geneologi konflik di Timor Timur, bagaimana keterlibatan Indonesia dan mengapa masih ada suara-suara ketidakpuasan terhadap propinsi termuda Indonesia ini sebagai latar belakang persolan politik yang dihadapi Timor Timur hingga kini. Demi mencapai tujuan ini, maka pembahasan akan dimulai dengan persoalan konflik yang dihadapi Timor Timur khususnya sebelum berintegrasi dengan Indonesia, yaitu pada periode 1974-1976. Bahasan ini perlu dikemukakan, karena periode ini dapat dikatakan merupakan awal dari akar persoalan konflik Timor Timur yang berlangsung hingga

saat ini dan juga sebagai masa-masa krusial yang menentukan terhadap masa depan Timor Timur selanjutnya. Sebelum ditutup dengan analisis mengenai masa depan Timor Timur, pada sub bab berikutnya akan dikaji pula persoalan yang dihadapi Timor Timur pasca integrasi. Pembahasan ini untuk menjawab pertanyaan mengapa ketidakpuasan sebagian masyarakat Timor Timur yang diwujudkan melalui gerakan resistensi perlawanan anti-integrasi terhadap Indonesia terus berlanjut di wilayah ini padahal banyak sudah kemajuan yang dicatat di propinsi ini setelah berintegrasi dengan Indonesia.

II. Akar Masalah dan Ketidakpuasan Masyarakat Timor Timur

A. Periode Sebelum Integrasi Tahun 1974-1976

Sejarah Timor Timur mungkin tidak akan banyak mengalami perubahan jika saja tidak terjadi kudeta militer pemerintahan Portugal 25 April 1974, yang disebut "Revolusi Bunga" (*Revolucao dos Cravos*). Tak lama setelah menumbangkan pemerintahan fasis diktator Antonio de Oliveira Salazar, rezim baru militer di bawah pimpinan Spínola memutuskan untuk mendekolonisasi jajahan-jajahannya di luar negeri, termasuk Timor Portugis (nama Timor Timur sebelum bergabung dengan Indonesia). Kebijakan dekolonisasi ini, bertujuan untuk melepas status Timor Timur sebagai jajahan Portugal dan memberikan kemerdekaan bagi rakyat Timor Timur yang telah dikuasainya lebih dari empat ratus tahun.

Sebagai respon atas kebijakan baru tersebut, pada 8 Mei 1974 Gubernur dan komandan militer Timor Timur, Kolonel Fernando Alves Aldela mengizinkan masyarakat Timor Timur mendirikan partai-partai politik. Pembentukan partai-partai politik ini sebagai langkah awal untuk menyiapkan penentuan masa depan politik Timor Timur melalui referendum, yang direncanakan akan berlangsung pada 13 Maret 1975. Ada tiga macam alternatif mengenai status akhir wilayah Timor Timur nantinya yang dapat ditentukan oleh rakyat Timor di dalam proses dekolonisasi ini, yaitu: (1) menjadi wilayah otonom di bawah federasi atau berasosiasi dengan Portugal, (2) memisahkan diri sebagai negara

berdaulat merdeka (sebagai bagian atau di luar Persemakmuran Portugal) dan (3) mengintegrasikan diri dengan Republik Indonesia¹.

Untuk itu maka sejak Mei 1974 lahir lima partai politik yang kemudian ikut meramaikan pentas politik di koloni Portugal ini. Mereka mewakili apa yang kemudian muncul sebagai tiga pilihan yang tersedia berkaitan dengan masa depan daerah jajahan ini. Mereka adalah UDT (*Uniao Democratica Timorese*); ASDT (*Associacao Social Democratica de Timor*) yang kemudian berganti nama menjadi FRETILIN (*Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente*); APODETI (*Associacao Popular Democratica de Timor*); KOTA (*Klibur Oan Timur Aswain*); dan TRABALHISTA atau Partai Buruh². Di antara lima partai politik tersebut di atas, partai pertama yang berdiri adalah UDT. Partai ini secara resmi berdiri pada 11 Mei 1974. UDT ini pada awalnya memilih untuk bergabung dengan Portugal, tetapi kemudian berganti untuk mendukung ide berintegrasi dengan Indonesia. Sementara itu, ASDT atau Fretilin yang lahir pada 20 Mei 1974 lebih menyukai pilihan kemerdekaan bagi Timor Timur. Partai ketiga, yaitu APODETI yang mulanya disebut AITI (*Associacao Integracao de Timor Indonesia*) berdiri pada 27 Mei 1974 memilih integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia. Sedangkan KOTA atau yang berarti *Sons of the Mountain Warriors* yang didukung oleh pemimpin-pemimpin tradisional dan TRABALHISTA atau Partai Buruh juga lebih memilih integrasi Timor Timur ke Indonesia³.

¹ Haris Munandar (penyunting), *Pembangunan Politik, Situasi Global dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1994, h.284.

² Menurut James Dunn, di samping lima partai politik tersebut ada juga partai politik yang dikenal dengan Aditla Party, the *Associacao Democratica Integracao Timor-Leste Australia* (Democratic Association for the Integration of East Timor into Australia), yang dibentuk akhir 1974. Namun kelangsungan partai ini tidak bertahan lama, setelah tujuannya untuk mengintegrasikan Timor Timur ke dalam wilayah Australia ditolak oleh pemerintah Australia bulan Maret 1975. Lihat James Dunn, *Timor: A People Betrayed*, Brisbane, The Jacaranda Press, 1983, h.75-76.

³ *Facts on East Timor*, Bagian Penerangan, Kedutaan Besar RI di Washington D.C, Februari 1991, h.2.

Dalam kaitannya dengan kebijakan Portugal untuk mendekolonisasi Timor Timur, pemerintah Indonesia bersikap mendukung ide tersebut. Bahkan Indonesia secara konsisten menyatakan tidak memiliki ambisi untuk "mencaplok" wilayah Timor Timur dan akan menerima baik seandainya Timor Timur menjadi negara merdeka⁴. Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia juga mencari jaminan dari pemerintah Portugal bahwa proses dekolonisasi dan tindakan *self determination* atau hak untuk menentukan nasib sendiri tersebut akan merefleksikan keinginan rakyat Timor Timur⁵. Sebagai upaya untuk menciptakan proses dekolonisasi yang damai di wilayah ini, Indonesia dan Portugal sepakat menyelenggarakan pertemuan beruntun di New York September 1974, Lisabon Oktober 1974, London Maret 1975, Macao Juni 1975, Jakarta Agustus dan September 1975 dan Roma Nopember 1975⁶.

Namun dalam kenyataannya, dekolonisasi Timor Timur yang dijalankan oleh Portugal tersendat-sendat pelaksanaannya. Hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah kolonial pusat terhadap Timor Timur, sebagai akibat terus berlanjutnya perselisihan faksi-faksi dalam politik domestik Portugal. Ini ditandai

⁴ Nancy Viviani, "Australians and the Timor Issue", *Australian Outlook*, Agustus 1976, h. 198.

⁵ *Facts on ...*, h.2. Konsekwensi penting dari perubahan yang terjadi di Lisabon dan kebijakan baru tentang Timor Timur yang menyertainya, telah menyebabkan pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan yang lebih aktif terhadap daerah koloni Portugal tersebut. Ini terlihat dari penunjukkan Ali Moertopo oleh Presiden Soeharto untuk bertugas menangani seluruh proses pembicaraan dengan Portugal menyangkut Timor Timur pada 5 Oktober 1974. Ini juga mengawali dilaksanakannya Operasi Komodo, gagasan Ali Moertopo, yang diatur untuk mempromosikan integrasi wilayah tersebut dengan Indonesia tanpa operasi militer. Lihat lebih lanjut di Bilveer Singh, *Timor Timur, Indonesia dan Dunia: Mitos dan Kenyataan*, edisi revisi, Jakarta: Institute for Policy Studies, 1998, h.17.

⁶ Untuk diskusi lebih lanjut mengenai pertemuan ini, terutama yang di Macao dan Roma, lihat James Dunn, *Timor...*, h.96-98, 260-61 dan 265-268.

dengan keretakan hubungan Spínola dan para pengikut garis keras di AMF (Gerakan Angkatan Bersenjata Portugal) antara Agustus dan September 1974, yang berakhir dengan jatuhnya pemerintahan junta pada 9 Juli 1975⁷. Ketidaksiwaan Portugal terhadap proses dekolonisasi Timor Timur juga dikarenakan Portugal lebih mencurahkan sebagian besar perhatiannya pada dekolonisasi koloninya di Afrika. Dalam hal ini, jarak jauh Portugal dan Timor Timur mungkin dapat dikemukakan sebagai salah satu alasan Portugal untuk tidak memberikan perhatian yang sama besarnya.

Tali temali beberapa kondisi di atas, pada gilirannya telah mendorong kekacauan situasi politik di Timor Timur. Ketidaksiwaan pemerintah Portugal akan proses dekolonisasi, menyebabkan partai-partai politik di Timor Timur cenderung menentukan kebijakannya sendiri-sendiri. Sebagai konsekwensinya tidak mengherankan apabila kemudian muncul perebutan kekuasaan di antara partai-partai politik, yang akhirnya meletuskan perang saudara. Meskipun pada awalnya UDT menyetujui membentuk koalisi dengan Fretilin pada 22 Januari 1975 di Dili⁸, namun pada akhirnya koalisi ini pecah. Kedua partai politik tersebut memiliki perbedaan yang mendasar, dimana UDT lebih memilih peralihan kekuasaan secara bertahap dari Portugal ke rakyat Timor, sementara Fretilin lebih menginginkan peralihan kekuasaan yang cepat. Konflik ini memuncak pada Mei 1975. UDT kemudian meninggalkan koalisi, karena ketiadaan kemungkinan melakukan rekonsiliasi pandangan dengan Fretilin⁹.

Hanya saja setelah pecahnya koalisi tersebut, Fretilin praktis berjalan sendirian. Untuk mencapai tujuan partainya, Fretilin pada akhir Juli 1975 berusaha memaksakan kehendaknya dengan melakukan serangkaian kekerasan di beberapa wilayah di Timor Timur, seperti di Maubisse, Ainaro dan Railaco¹⁰. Situasi keamanan yang semakin memburuk di Timor Timur ini, telah melahirkan desas desus bahwa

⁷ Mengenai perselisihan mereka dapat dilihat lebih lanjut di Bilveer Singh, *Timor Timur, Indonesia ...*, h.15-16.

⁸ *Proses Dekolonisasi Timor Timur*, Departemen Penerangan RI, Jakarta, 1976, h.9.

⁹ Nancy Viviani, *Australians ...*, h.213.

¹⁰ *Proses Dekolonisasi ...*, h.213.

Fretilin akan melancarkan kudeta pada Agustus 1975. Kondisi ini memicu situasi di daerah koloni Portugal menjadi semakin tidak terkendali. Bahkan frekwensi konflik bersenjata antara partai-partai politik yang bersaing juga semakin memuncak tajam. Dalam iklim politik internal yang tidak jelas inilah, pada 10 Agustus 1975 UDT melancarkan sebuah kudeta¹¹. Kudeta ini menandai babak politik baru di koloni Portugal ini, yaitu perang saudara sesama rakyat Timor. Perang saudara ini berlangsung antara Agustus hingga Desember 1975 dengan Fretilin di satu pihak dan UDT, Apodeti, KOTA dan TRABALHISTA di pihak lain. Peristiwa ini pada akhirnya menyebabkan runtuhnya kekuasaan Portugal atas pulau Timor yang telah berlangsung selama lebih dari 400 tahun.

Pada awalnya, pertempuran kedua belah pihak hanya terbatas pada daerah-daerah pedesaan, namun kemudian meluas ke seluruh wilayah Timor Timur. Ini ditandai dengan kemenangan Fretilin merebut Dili pada 22 Agustus 1975 dan kemudian menguasai hampir sebagian besar wilayah Timor. Sebagai akibat dari meningkatnya intensitas konflik ini, Gubernur Lemos Pires dan pejabat Portugal lainnya kemudian melarikan diri dari Dili ke kepulauan Atauro pada 27 Agustus 1975¹².

Peristiwa penting kemudian terjadi pada 11 September 1975, ketika UDT yang pada awalnya pro Portugal secara bersama-sama dengan Apodeti, KOTA dan TRABALHISTA mendeklarasikan keinginannya untuk bergabung dengan Indonesia di Batugede, Bobonaro. Keputusan ini didasarkan pada pandangan, bahwa pemerintah Portugal di Lisabon telah gagal dalam menjalankan tugasnya untuk membangun proses dekolonisasi di Timor Timur, dan

¹¹ Menurut Nancy Viviani, kudeta berlangsung pada 12 Agustus 1975. Lihat Nancy Viviani, *Australians...*, h.213. Sedangkan menurut pihak Indonesia, kudeta berawal pada 10/11 Agustus 1975 ketika 4.000 anggota UDT melakukan demonstrasi di Dili dan mulai menduduki beberapa tempat penting. Lihat *Proses Dekolonisasi...*, h.14. Lihat juga *Tempo*, 23 Agustus 1975 dan 6 September 1975. Dunn secara jelas menyebutkan kudeta terjadi tanggal 11 Agustus 1975. Lihat Dunn, *Timor...*, h.173.

¹² Bilveer Singh, *Timor Timur...*, h.30.

memburuknya situasi di Timor Timur karena ketidakmampuan Portugal untuk memelihara situasi menjadi perang sipil¹³.

Hanya saja deklarasi tersebut kemudian memperoleh tanggapan balik dari Fretilin. Fretilin mengambil tindakan secara sepihak dengan menyatakan kemerdekaan Timor Timur pada 28 Nopember 1975 dan membentuk *Democratic Republic of East Timor* atau Republik Demokratik Timor Timur¹⁴. Isi deklarasi ini tidak dapat diterima oleh partai lainnya yang menyebabkan mereka bereaksi balik dengan memproklamkan Deklarasi Balibo 30 Nopember 1975, yang intinya menyuarakan keinginan mayoritas rakyat Timor Timur untuk berintegrasi dengan Indonesia. Keempat partai tersebut, kemudian membentuk Pemerintahan Sementara Timor Timur (PSTT) yang diketuai oleh Arnaldo Dos Reis Araujo (Ketua Apodeti)¹⁵.

Pernyataan kemerdekaan Fretilin yang kemudian disusul dengan pernyataan tandingan ke empat partai politik tersebut di atas, pada akhirnya membuka jalan bagi Indonesia untuk melakukan campur tangan terhadap masalah Timor Timur. Apalagi dengan semakin gencarnya konflik senjata antara Fretilin dan partai yang pro-integrasi membuat pemerintah Indonesia semakin khawatir terhadap keamanan nasionalnya, mengingat letak Timor Timur yang bersebelahan dengan wilayahnya. Dengan mendasarkan diri pada berbagai pertimbangan ini, pemerintah Indonesia kemudian mengirim pasukan dan sukarelawan-sukarelawanannya untuk membantu perjuangan ke empat partai politik di atas melawan Fretilin. Perlawanan ini mencapai puncaknya dengan jatuhnya kota Dili pada 7 Desember 1975.

Sebagai tindak lanjut dari "keputusan untuk berintegrasi" yang telah disampaikan melalui Deklarasi Balibo di atas, pimpinan PSTT bersama dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Timor Timur pada 31 Mei 1976 di Dili, membuat suatu petisi yang berisi desakan kepada pemerintah Indonesia agar segera menerima dan mengesahkan integrasi Timor Timur ke Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya. Petisi Rakyat Timor Timur yang disampaikan kepada Presiden Soeharto pada 7 Juni 1976 diterima oleh pemerintah RI dan kemudian pada 17 Juli

¹³ *Proses Dekolonisasi ...*, h.18.

¹⁴ James Dunn, *Timor Timur...*, h.275.

¹⁵ Haris Munandar, *Pembangunan Politik...*, h.266.

1976 disahkan dengan Undang-undang No.7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

UU ini telah menandai satu babakan baru sejarah Timor Timur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah negara kesatuan RI. Namun demikian, integrasi ini juga menjadi sebuah awal masalah dari reaksi berantai yang tidak pernah terputus hingga sekarang ini. Apa yang semula hanya merupakan sebuah krisis politik domestik antara beberapa kekuatan politik pada Agustus 1975, kemudian sejak Juli 1976 telah berkembang sebagai isu yang tidak pernah padam dengan Indonesia sebagai titik sentralnya. Indonesia menganggap integrasi tersebut telah selesai dan *legitimate*. Namun tidak demikian halnya bagi Fretilin, Portugal dan sebagian negara-negara di dunia. Mereka menganggap integrasi tersebut hanya merupakan *fait accompli* (pernyataan sepihak) Indonesia, dan oleh karenanya tidak sah. Mereka ini kemudian membawa masalah integrasi Timor Timur ini ke dalam berbagai forum internasional, termasuk PBB yaitu pada sidang Komite Dekolonisasi.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka kita kemudian dapat melakukan klasifikasi akar masalah Timor Timur sebelum integrasi dengan Indonesia dalam beberapa pokok persoalan berikut, yaitu:

1. Ketidakterseriusan pemerintah Portugal dalam proses dekolonisasi.
2. Persoalan politik domestik Timor Timur yang diakibatkan oleh adanya persaingan tajam di antara beberapa partai politik yang memiliki landasan ideologi yang berbeda dalam memperebutkan kekosongan kekuasaan di Timor Timur, terutama setelah Portugal meninggalkan wilayah ini.
3. Masalah Timor Timur menjadi semakin rumit dengan keterlibatan pemerintah Indonesia, terutama karena proses integrasi terjadi dengan kekerasan. Integrasi Timor Timur ke dalam wilayah negara kesatuan RI pada kenyataannya bukan merupakan solusi penyelesaian "terbaik". Ini terbukti dengan belum diterimanya secara penuh integrasi wilayah tersebut oleh sebagian rakyat Timor Timur yang diwakili oleh Fretilin, Portugal dan sebagian

masyarakat internasional dengan berbagai macam alasan, sebab-sebab dan kepentingan politis masing-masing.

- a. Fretilin, berdasarkan fanatisme akan ideologi komunisme yang mungkin sedang mencari idiom, gaya dan bentuk perjuangan yang lain setelah bubarnya pemerintahan komunis di Uni Soviet dan negara-negara Tirai Besi. Selain itu juga disebabkan juga oleh adanya dorongan pribadi tokoh-tokohnya seperti Ramos Horta yang ambisius, oportunis dan kehilangan makna diri dengan bubarnya Timor Portugis¹⁶.
- b. Portugal, disebabkan oleh keinginan memperoleh prestis sebagai negara yang mempunyai tanggung jawab moral dan mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan serta demi kepentingan ekonomisnya terhadap perairan Timor yang dikabarkan banyak mengandung deposit minyak bumi. Padahal pada kenyataannya "perhatian" yang diberikan Portugal terhadap Timor Timur tidak lain didorong oleh keinginannya untuk menyelamatkan muka karena kesalahan masa lalu, khususnya cara meninggalkan wilayah ini dan kegagalannya melaksanakan dekolonisasi Timor Timur secara tertib.
- c. PBB dan sebagian negara-negara di dunia, belum menerima integrasi Timtim ke dalam wilayah RI karena disebabkan antara lain oleh: (1) pengaduan dari Portugal dan negara-negara lain yang dengan kepentingan politisnya masing-masing menyatakan bahwa integrasi tersebut tidak sah, (2) PBB tidak bisa menerima sebuah petisi yang dihasilkan tanpa sebuah referendum. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Warief Djajanto sebagai berikut: *"It seems that a number of foreign governments have not publicly supported Indonesia's Timor policy because the integration process is being conducted without a referendum or a one-man-one-vote rule is inconsistent with the Security Council resolution underscoring the inalienable right of the people of East Timor to self determination"*¹⁷.

¹⁶ E.M Tomodok, *Hari-Hari Akhir Timor Portugis*, h.354.

¹⁷ Dikutip dari Yooke Adelina Damopili, *Diplomasi Indonesia Dalam Masalah Timor Timur (1976-1986)*, skripsi S1 pada Jurusan HI, Fisipol-Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1997, h.11.

B. Periode Pasca Integrasi

Nampaknya tidak ada seorangpun yang dapat memungkiri bahwa sesudah Timor Timur menjadi bagian dari Negara RI sejak tahun 1976, telah banyak sekali kemajuan yang dicapai. Secara fisik masyarakat pulau tersebut telah mencapai kemajuan yang sangat pesat. Melalui berbagai proyek dan program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, masyarakat Timor Timur relatif dapat dikatakan telah berhasil mengejar ketinggalannya dengan propinsi lain di Indonesia yang jauh lebih tua.

Meskipun berbagai kemajuan telah banyak dicatat, namun demikian yang menarik hingga kini Timor Timur masih menunjukkan sisi-sisi kontroversialnya. Ini terbukti dari sering munculnya sikap resisten dan bahkan menentang di kalangan masyarakat Timor Timur terhadap upaya-upaya transformasi yang dijalankan pemerintah selama ini. Bahkan sikap inipun kerap datang pula dari berbagai pihak di luar negeri, meskipun pada saat sama mereka pun mengakui adanya perbaikan kehidupan rakyat Timor Timur dibanding ketika masih di bawah koloni Portugal dahulu. Sikap ini nampaknya lebih didorong oleh adanya ketidakpuasan mereka terhadap beberapa persoalan yang masih menggajal pada aspek-aspek berikut:

1. Sosial budaya

Kendati perhatian pemerintah pusat terhadap proses pembangunan di Timor Timur terus ditingkatkan sebagaimana yang dapat dilihat dari perubahan-perubahan positif yang terjadi secara fisik, namun ternyata hal ini belum memuaskan pihak-pihak tertentu. Hingga saat ini suara-suara ketidakpuasan masih tampak di sebagian besar penduduk Timor Timur. Ini ditandai dengan munculnya berbagai masalah berupa gerakan perlawanan di dalam dan di luar negeri.

Meskipun pembangunan fisik di atas penting, namun masalah pembangunan di Timor Timur sebenarnya bukanlah sekedar membangun infrastruktur-fisik, seperti jalan, jembatan, gedung sekolah dan pusat pelayanan kesehatan. Masalah pembangunan yang tidak kalah pentingnya di Timor Timur adalah bagaimana pemerintah dapat

melaksanakan "pembangunan manusia Timor Timur seutuhnya"¹⁸, yang tidak saja meliputi pembangunan fisik dan namun juga melibatkan pembangunan yang sifatnya non-fisik. Sebagai konsekuensi dari pembangunan yang menggunakan model pendekatan demikian, maka partisipasi seluruh warga menjadi pra-syarat utama. Padahal kenyataan selama ini memperlihatkan bahwa, tidak sedikit warga masyarakat di daerah ini yang merasa terlewatkan atau terabaikan begitu saja dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika mereka cenderung "pasif" dalam mengantisipasi setiap peluang dari proses pembangunan yang tengah berlangsung.

Masalah tersebut muncul, antara lain karena kurangnya pemahaman memadai dari pemerintah Indonesia dan aparatnya tentang karakteristik sosial-budaya orang Timor Timur. Padahal pemahaman mendalam atas budaya rakyat Timor Timur sangat penting bagi pelaksanaan tugas sehari-hari para aparat pemerintah di wilayah tersebut. Kurangnya pengetahuan tentang budaya lokal, membuat para aparat pemerintah daerah sering menghadapi kesulitan melaksanakan program-program pembangunan yang tentu saja menuntut partisipasi masyarakat.

Perlu dicatat, meski Timor Timur telah terintegrasi ke dalam Indonesia, nampak jelas bahwa rakyat daerah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dengan rakyat Indonesia pada umumnya. Sementara mayoritas penduduk Indonesia beragama Muslim dan keturunan Melayu, rakyat Timor Timur adalah orang Melanesia dan beragama Katolik Roma. Mereka juga memiliki sejarah kolonialisme yang berbeda. Secara fisik, mereka tidak pernah terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Ketika Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia juga tidak mengklaim Timor Timur sebagai bagian dari wilayah RI, berbeda dengan sikap terhadap Irian Jaya dan Aceh yang secara politis dan historis memang menjadi bagian wilayah RI. Adanya perbedaan-perbedaan yang sangat besar ini, tidak dapat dipungkiri telah banyak menimbulkan ketegangan sosial-kultural di antara dua orang yang mulai hidup bersama sejak tahun 1976. Hal

¹⁸ Haris Munandar, *Pembangunan Politik...*, h.272.

ini nampak semakin jelas dari hasil penelitian yang dilakukan oleh tim riset dari UGM sebagai berikut:

Ada kesan di kalangan penduduk asli bahwa para pendatang tidak mau merasakan kehidupan sosio-kultural penduduk asli. Di kantor-kantor pemerintah, para pendatang seringkali menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing, sehingga para petugas yang kebetulan asli Timor Timur merasa terisolir. Tingkah laku paternalistik yang berlebihan dari petugas yang berasal dari pendatang ini terhadap penduduk asli, kerap kali meningkatkan kesan di mata penduduk asli bahwa mereka dianggap bodoh dan harus belajar dari para pendatang ... "Etnosentrisme" yang digunakan oleh para pendatang dalam menilai tingkah laku atau teknologi penduduk asli adalah salah satu alasan mengapa masalah ketegangan antara para pendatang dan penduduk asli meningkat¹⁹.

Ketegangan sosial-kultural antara pendatang dan penduduk asli di atas nampaknya semakin parah, terlebih setelah pemerintah Indonesia menerapkan dua kebijakan yaitu membuka daerah Timor Timur dan transmigrasi. Kebijakan ini telah memunculkan kekhawatiran penduduk asli bahwa kebudayaan dan pandangan hidup mereka akan disingkirkan oleh para pendatang baru. Bagi penduduk asli, nilai-nilai yang dibawa pendatang tersebut dianggap sebagai nilai asing. Ada sebagian kecil di antara mereka yang berhasil untuk mengadopsinya, namun banyak di antara mereka yang kesulitan bahkan tidak sedikit yang terpuruk dan tersingkirkan oleh proses pembangunan yang berjalan cepat. Akhirnya yang muncul dalam sikap masyarakat adalah apatisme dan sikap yang menentang terhadap perubahan. Lebih ekstrimnya adalah munculnya sikap "benci" terhadap segala sesuatu yang datang dari luar.

Sehingga kemudian menjadi sesuatu hal yang wajar, jika sikap anti-integrasi di kalangan warga Timor Timur sendiri masih laten

¹⁹ The Rural Development Research and Center Team, Gadjah Mada University, *Socio-Anthropological Research of the East Timorese Community*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1990, h.17

sifatnya. Peristiwa pengrusakan pasar Becora pada akhir 1994 yang berawal dari ketegangan sosial-kultural antara para pendatang dan penduduk asli dan peristiwa Liquisa pada 12 Januari 1995 yang bersumber dari pelecchan suatu agama tertentu, yang kemudian berkembang menjadi gerakan anti integrasi, misalnya, sebenarnya merupakan refleksi yang sangat kuat dari sikap "anti dari luar".

2. Ekonomi.

Setelah 23 tahun berintegrasi dengan Republik Indonesia, tak dapat disangkal bahwa Timor Timur mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat di bidang ekonomi. Tetapi pada saat yang sama, kemajuan tersebut juga telah menimbulkan konsekwensi-konsekwensi negatif yang terkait, yang pada gilirannya dapat merusak struktur politik dan sosial masyarakat propinsi ini.

Pertama, meskipun Indonesia dapat dikatakan telah sangat berhasil dalam meningkatkan standar pendidikan di propinsi ini dengan salah satu indikatornya yaitu terjadinya peningkatan jumlah melek huruf yang mencapai lebih dari 90 persen, tetapi karena kesempatan kerja tidak berkembang sebanding dengan peningkatan pendidikan, di propinsi ini telah muncul suatu kelas baru yang terdidik dan menganggur. Apabila pada tahun 1989 persentase kaum pengangguran baru 0.28%, akan tetapi pada tahun 1990, angkanya sudah meningkat tajam menjadi 2.15%²⁰. Pada tahun 1997 angka pengangguran di Timtim telah mencapai 13.000 orang dan akan terus bertambah sebanyak 5.000 orang per tahunnya²¹. Tingkat pengangguran yang cukup tinggi yang sebagian besar terdiri dari anak-anak muda terdidik ini, tentu mempunyai potensi besar untuk memicu munculnya gejolak sosial. Hal ini telah menjadi sumber utama tantangan politik Indonesia, karena mereka terbukti mengganggu stabilitas politik propinsi ini.

Kedua, adanya keyakinan pada sebagian rakyat Timor Timur bahwa kehadiran pemerintah Indonesia di propinsi ini hanya merupakan suatu bagian dari "penjajahan baru" oleh orang Indonesia terhadap

²⁰ Haris Munandar, *Pembangunan Politik...*, h.290.

²¹ *Kompas*, "Sejumlah Masalah Jika Timtim Merdeka", 1 Februari 1999.

suku bangsa Timor Timur²². Hal ini tidak lain karena di propinsi ini telah dibanjiri dengan kehadiran para pendatang, orang Indonesia non Timor Timur, yang kemudian banyak mengambil alih sektor-sektor ekonomi yang vital - termasuk salah satunya tindakan monopoli ekonomi seperti yang dilakukan PT. Dhenok yang dikuasai oleh ABRI terhadap perdagangan kopi di propinsi ini - yang dianggap merugikan putera daerah.

Penguasaan sektor-sektor ekonomi oleh para pendatang ini terlihat jelas di berbagai wilayah propinsi Timor Timur. Fenomena seperti ini juga nampak di Kabupaten Dili, misalnya. Dari lima buah hotel yang ada, sebuah dimiliki Pemda Tingkat I Timor Timur dan sisanya kini dikuasai oleh pengusaha yang berasal dari luar Timor Timur. Bahkan hampir semua toko besar yang tersebar di kota ini, tidak satupun dimiliki oleh penduduk asli. Demikian juga halnya dengan sarana transportasi, hanya sopirnya saja yang kebanyakan orang Timor, sedang pemiliknya kebanyakan datang dari Jawa atau Sulawesi Selatan. Rumah-rumah makan pun tidak jauh bedanya hampir semuanya dimiliki oleh pendatang²³.

Sebagai akibatnya, wajar jika muncul ketidaksenangan rakyat Timor Timur terhadap kehadiran para pendatang. Di samping hilangnya berbagai kesempatan ekonomi, para pendatang - sebagian besar orang Jawa, Makasar dan Bali - yang menguasai aspek ekonomi, sudah tentu mereka memiliki tingkat kehidupan yang jauh lebih baik di banding dengan penduduk asli Timor Timur. Kondisi ekonomi penduduk lokal sangat tidak menguntungkan, mereka masih tetap miskin. Jurang kesenjangan sosial amat lebar antara penduduk asli dan pendatang di propinsi ini pada gilirannya telah memicu munculnya kecemburuan sosial, yang pada akhirnya mengarah terjadinya kerusuhan massal yang mengganggu situasi keamanan politik. Masalah ini sering terjadi, karena meskipun kemajuan ekonomi berlangsung, namun ironisnya terjadi distribusi yang tidak merata.

²² Y. Argo Twikromo (et. al), *Persepsi dan Perilaku Kesejahteraan Hidup Rakyat Timor Timur*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, h.9.

²³ Indria Samego, "Timor Timur: Ibarat Kerikil dalam Sepatu", *Profil Indonesia*, Jurnal tahunan CIDES No.2 Tahun 1996, h.149-50.

3. Hak Asasi Manusia (HAM)

Di samping masalah sosial budaya dan ekonomi, ketidakpuasan sebagian masyarakat Timor Timur terhadap Indonesia yang terrefleksikan melalui terus berlanjutnya tuntutan referendum dan resistensi perlawanan yang berbau anti-integrasi adalah karena mereka menganggap telah terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia dan kekejaman luar biasa di propinsi ini. Hal itu bahkan telah berlangsung sejak Indonesia secara resmi menyetujui integrasi Timor Timur ke dalam wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dua puluh tiga tahun lalu. Mereka menyatakan bahwa Indonesia melalui berbagai kebijakannya telah melakukan pembunuhan terhadap 100 ribu orang atau seperenam penduduk di propinsi ini²⁴. Meskipun kebenaran jumlah angka ini masih perlu dipertanyakan lebih lanjut, namun sesudah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana yang terjadi di Aceh diketahui umum, kejadian serupa di Timor Timur tentu tidak dapat begitu saja diabaikan. Terlebih ketika Indonesia masuk ke Timor Timur pada Desember 1975 menyusul Deklarasi Balibo, wilayah Timor Timur sedang dilanda peperangan.

Dalam kaitannya dengan masalah pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur, hingga saat ini Indonesia telah sering menjadi sasaran "tembak" di berbagai forum baik nasional maupun internasional. Persoalan ini juga terbukti telah mengganggu hubungan bilateral Indonesia dengan sejumlah negara, seperti Australia, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Kenyataan ini telah membuat masalah hak asasi manusia di Timor Timur dapat diibaratkan seperti "kerikil dalam sepatu" dalam perjuangan diplomasi Indonesia. Tidak begitu dirasakan sakitnya, namun cukup mengganggu dalam upaya Indonesia menggalang pergaulan dengan bangsa-bangsa di dunia. Terlebih setelah adanya laporan dari berbagai organisasi yang bergerak dalam bidang hak asasi manusia yang menyatakan, bahwa ABRI menembaki rakyat sipil seperti yang terjadi pada insiden Santa Cruz di Dili Nopember 1991, Liquisa pada awal 1995 dan akhir-akhir ini di Alas pada

²⁴ Lihat misalnya surat yang dikirim pada 29 April 1986 oleh 122 anggota Kongres AS kepada Presiden Ronald Reagan saat akan melakukan kunjungan ke Bali, di *The United Nations and East Timor*, h.129.

pertengahan Nopember 1998. Banyak pengkritik berpendapat, bahwa apa yang dilakukan ABRI pada berbagai peristiwa tersebut adalah merupakan tipikal tingkah laku mereka di Timor Timur secara keseluruhan. ABRI diyakini telah menggunakan kekuatan yang berlebihan dalam menumpas demonstrasi yang tidak bersenjata. Hal ini menunjukkan dengan jelas besarnya penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki ABRI.

Penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana yang dicerminkan melalui berbagai pelanggaran HAM yang sebagian besar dilakukan oleh ABRI di Timor Timur di atas, nampaknya sangat berkaitan langsung dengan menonjolnya peran mereka di propinsi ini. Pendekatan ABRI yang memberikan bobot lebih pada dimensi keamanannya melalui Komando Operasi Keamanan (Koopskam), telah memberikan peluang bagi terjadinya berbagai pelanggaran hak asasi manusia di propinsi termuda ini. Hanya saja sejak 6 Desember 1989, ABRI mulai berbenah diri dengan menghapuskan Koopskam dan kemudian menyerahkan masalah keamanan pada Komando Resor Militer (Korem) setempat. Pendekatan baru ini berarti menghapuskan pendekatan keamanan yang telah mendominasi aktivitas-aktivitas administratif di Timor Timur, karena ABRI kemudian menggantikannya dengan pendekatan teritorial dalam operasinya di propinsi ini. Melalui pendekatan ini, ABRI lebih memberikan tekanan pada kesejahteraan, dimana peningkatan ekonomi rakyat Timor Timur diberi prioritas tertinggi. Sejak saat itu, 90 persen personel militer di propinsi ini dilibatkan dalam operasi wilayah, sedang 10 persen sisanya menangani operasi tempur²⁵.

Melalui pendekatan baru ini, sebenarnya banyak pihak yang berharap jika peran ABRI dikurangi sedemikian rupa, maka pelanggaran HAM di Timor Timur juga akan berkurang atau bahkan berhenti. Namun demikian, pada kenyataannya pendekatan baru ini pun belum mampu berbuat banyak, pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur masih juga tetap berlangsung. Oleh karenanya tidak mengherankan, bila baru-baru ini 100 pemuda Timor Timur yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Pelajar Timtim (Impettu)

²⁵ Bilveer Singh, *Timor Timur...*, h. 328.

menggelar demonstrasi di Jakarta. Mereka menuntut dilaksanakan referendum dan juga agar ABRI segera menarik pasukannya di propinsi ini²⁶.

4. Legitimasi

Integrasi Timor Timur dengan Indonesia selama 23 tahun terakhir ini pada kenyataannya terbukti tidak mampu memuaskan semua pihak. Ini terbukti dengan perlawanan-perlawanan politik yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Timor Timur dan juga berbagai kecaman dan kritikan yang dilontarkan oleh negara-negara asing terhadap "invasi" Indonesia atas Timor Timur. Hal itu bermula pada ketidakpuasan mereka terhadap status Timor Timur yang dianggap belum tuntas. Bahkan menurut mereka legitimasi kontrol Indonesia atas kedaulatan wilayah bekas jajahan Portugis tersebut tidak sah. Meskipun pada sisi lain, pemerintah Indonesia melihat hal itu dengan pandangan yang berbeda, yaitu bahwa integrasi Timor Timur sudah selesai.

Dalam kaitan ini, pihak Indonesia sering mengemukakan lima peristiwa penting yang menjadi dasar pertimbangan Indonesia untuk menerima integrasi Timor Timur. *Pertama*, pernyataan deklarasi rakyat Timor Timur untuk integrasi yang diwakili oleh empat partai politik (Apodeti, UDT, KOTA dan Trabalista) pada Nopember 1975. *Kedua*, resolusi dari anggota DPR Timor Timur pada Mei 1976, yang sekali lagi menyerukan keinginan untuk berintegrasi. *Ketiga*, petisi itu kemudian diserahkan oleh delegasi parlemen Timor Timur kepada Presiden Suharto. *Keempat*, misi *fact-finding* Indonesia yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri ke Timor Timur pada Juni 1976. *Kelima*, permintaan agar Timor Timur dijadikan propinsi RI yang kemudian disahkan dengan UU nomor 7 tahun 1976 pada 17 Juli 1976.

Namun demikian, legitimasi Indonesia atas kontrol Timor Timur tersebut di atas hingga saat ini masih diperdebatkan. Bahkan hingga sekarang masih ada sejumlah kalangan yang berpandangan bahwa Portugal masih menjadi kekuatan sah yang memerintah di Timor Timur. Klaim ini didasarkan pada fakta, bahwa PBB melalui resolusi Majelis

²⁶ *Kompas*, "Warga Timtim Tuntut Referendum", 8 Desember 1998.

Umum yang tidak mengikat (37/30) pada 1982, terakhir kali perhitungan suara dilakukan badan ini, mengakui Portugal sebagai pihak yang memerintah di Timor Timur. Selain itu, kedaulatan Indonesia atas Timor Timur menurut sejumlah pihak juga tidak dibenarkan dilihat dari sisi hukum internasional. Menurut mereka, hukum internasional hanya menyetujui bahwa,

a sovereign power can invite a neighbouring state to provide troops for its defence. A political party or group of parties has no right to invite troops into a country, and the state which is invited by any organization other than another state violates international law if it complies²⁷.

Untuk menguatkan argumennya, mereka juga mengutip Piagam PBB yang juga melarang penggunaan kekerasan militer, sebagaimana yang dilakukan oleh Indonesia ketika memasuki wilayah Timor Timur. Piagam PBB tersebut menyatakan bahwa, "*armed intervention across frontiers other than in the course of action approved by the security council or in self-defence, or possibly to prevent a large scale humanitarian disaster*"²⁸.

Berdasarkan pandangan di atas, nampaknya tidak ada satu ketentuan pun yang dipenuhi Indonesia. Mereka memandang Indonesia tidak mematuhi dan bahkan dianggap telah melanggar ketentuan dan hukum internasional yang disepakati bersama. Oleh karenanya, sangat wajar bila mereka kemudian mempertanyakan legitimasi kontrol Indonesia atas Timor Timur.

Masih berlanjutnya pandangan negatif yang mempertanyakan status politik Indonesia atas Timor Timur tersebut di atas, ternyata sangat merugikan pihak Indonesia. Indonesia banyak mengalami tekanan-tekanan dan keberatan-keberatan yang diajukan oleh sejumlah negara mengenai legitimasi Indonesia atas kontrol Timor Timur. Pada

²⁷ Eric Aveybury, *A Positive Legal Duty: The Liberation of the People of East Timor*, makalah yang disampaikan pada Seminar yang diselenggarakan oleh Universitas Paramadina Mulya, Jakarta, 1 Desember 1998, h.3-4.

²⁸ Eric Aveybury, *A Positive.....*, h.4.

masa lalu, keberatan tersebut dapat saja diabaikan. Oleh karena pada masa itu, ada kepercayaan bahwa tak satu pihakpun punya hak untuk mencampuri urusan dalam negeri negara-negara lain dan bahwa kedaulatan negara dan integritas wilayah tidak boleh dilanggar. Namun demikian, dewasa ini pemikiran tersebut telah berubah. Pandangan yang muncul sekarang adalah penindasan yang dilakukan suatu pemerintahan terhadap kelompok minoritas politik dan etnis tidak dapat dibenarkan dengan alasan yurisdiksi dalam negeri²⁹. Hal ini semakin terlihat jelas terutama ketika ada masalah-masalah politik dan keamanan yang serius di Timor Timur, banyak pemerintahan Barat yang menyampaikan kritikan, kecaman dan bahkan embargo atas beberapa produk Indonesia. Ini antara lain disebabkan oleh fakta, bahwa banyak negara mempraktekkan demokrasi dan mereka tidak bisa melakukan sesuatu kecuali merespon permintaan rakyatnya untuk mengambil tindakan melawan Indonesia dalam masalah Timor Timur. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila masalah Timor Timur ini sering menjadi hambatan yang cukup serius bagi diplomasi kita di luar negeri.

Tali temali berbagai aspek persoalan di atas pada akhirnya telah memunculkan segala rasa frustrasi, kekecewaan dan sakit hati pada sebagian rakyat Timor Timur terhadap Indonesia. Ketidakpuasan masyarakat yang telah terakumulasi selama 23 tahun tersebut pada akhirnya memunculkan rasa nasionalisme Timor Timur yang semakin meningkat. Meskipun berbagai segi integrasi Timtim ke dalam Indonesia telah digalakkan dan telah mencapai banyak kemajuan politik, ekonomi, dan sosial kultural disertai dengan transformasi fisik berskala besar di propinsi ini, namun banyak rakyat Timor Timur yang dengan jujur tetap menyatakan ketidakbahagiannya. Sebagaimana diungkapkan oleh Xanana Gusmao, "[k]alaupun kita lihat selalu ada salah pendekatan dari Indonesia. ... semua pembangunan di Timtim tidak mengambil hati kami"³⁰. Sebagai kelompok minoritas yang dengan mudah dapat diidentifikasi dan pada umumnya kohesif, ini telah melahirkan dikotomi tegas antara "kita" lawan "mereka". Dan dengan semakin meningkatnya rakyat Timor Timur yang terdidik dan

²⁹ Bilveer Singh, *Timor Timur...*, h.333.

³⁰ *Kompas*, "Jose Alexandre Xanana Gusmao", 7 Februari 1999.

mengganggu, sangat wajar apabila rasa nasionalisme Timor-nya menjadi makin kuat. Kenyataan ini terlihat jelas dengan situasi destabilisasi politik yang tak putus di propinsi ini. Tuntutan referendum terus bermunculan dan resistensi perlawanan berbau anti-integrasi pun tidak pernah menunjukkan aktivitas yang surut, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

III. Proyeksi Penyelesaian Politik Masalah Timor Timur

Sebagaimana telah diuraikan di atas, integrasi Timtim dalam wilayah RI ternyata tidak pernah berhenti dipermasalahkan. Meskipun pemerintah Indonesia telah berbuat cukup banyak terhadap wilayah ini, namun tuntutan referendum, resistensi perlawanan untuk kemerdekaan Timor Timur dan tekanan internasional terus saja berlanjut. Kondisi ini pada akhirnya telah mendorong pemerintah Indonesia yang selama 23 tahun dapat dikatakan relatif cukup *rigid* terhadap masalah Timor Timur, untuk mengkaji ulang kembali posisinya. Indonesia selama ini selalu menganggap bahwa integrasi yang sudah berumur 23 tahun merupakan kenyataan yang tidak terbantah, walaupun dunia internasional beranggapan lain.

Kini semua sudah berubah dan pemerintah mulai menyadari begitu besarnya "ongkos politik dan ekonomi" yang telah dibayar akibat masalah Timtim ini. Dengan dikeluarkan kebijakan baru pada 27 Januari 1999 yang memuat dua opsi untuk melepaskan Timor Timur sebagai negara merdeka apabila tawaran otonomi luas ditolak, mengindikasikan bahwa pemerintah Indonesia menginginkan adanya penyelesaian tuntas masalah Timor Timur. Bahkan Presiden Habibie sendiri berharap mulai 1 Januari 2000, Indonesia tidak akan diganggu lagi dengan masalah Timor Timur³¹.

Bagi pemerintah Indonesia, jika opsi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah Timtim secara tuntas tersebut dapat terwujud apakah dalam bentuk otonomi khusus yang diperluas atau kemerdekaan Timtim, tentu akan memberikan beberapa nilai positif. Kita dapat

³¹ *Kompas*, "1 Januari 2000, Timtim tak Jadi Beban Lagi", 12 Februari 1999.

mengurangi anggaran belanja negara khususnya untuk propinsi Timtim yang selama ini cukup tinggi, hanya dalam rangka mempertahankan prestis segelintir elit-elit politik. Selain itu keputusan tersebut mempunyai momentum yang tepat terutama pada saat negara kita mengalami krisis moneter yang berkepanjangan ini. Di lain pihak pelaksanaan politik luar negeri masa mendatang juga tidak akan banyak lagi mengalami kendala-kendala politik (*political conditionalities*) khususnya pada aspek HAM. Keputusan ini juga dapat memberikan kredibilitas yang cukup tinggi kepada rezim sekarang terutama dalam semangat reformasi total.

Namun dibalik hal-hal positif seperti itu, keputusan Pemerintah untuk menyelesaikan masalah Timtim di atas yang secara sepintas nampak sangat sederhana, pada realitasnya sangat kompleks dan diiringi resiko-resiko tertentu bagi Pemerintah Indonesia sendiri dan khususnya bagi warga Timor Timur. *Pertama*, bagaimanakah sebenarnya bentuk otonomi khusus yang diperluas tersebut? Hingga saat ini dalam wilayah kedaulatan RI hanya dikenal satu propinsi yang memiliki status khusus, yaitu Jakarta sebagai ibu kota negara sehingga dikenal sebagai Daerah Khusus Istimewa Jakarta Raya, dan dua daerah istimewa yaitu, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Istimewa Aceh. Apakah dengan pemberian status khusus melalui otonomi yang diperluas di Timtim tidak akan mendorong daerah-daerah lain untuk menuntut hal sama? *Kedua*, sekiranya opsi pertama ditolak, bagaimana cara paling elegan bagi kemerdekaan Timor Timur karena sebagaimana diketahui hingga saat ini masih berlangsung persetujuan antara kelompok pro dan anti integrasi di Timtim sendiri.

Kompleksitas penyelesaian masalah Timor Timur di atas, nampaknya disadari oleh banyak pihak. Terutama karena tawaran pemerintah itu memang bisa membuka kesempatan salah paham dan membakar benih-benih perbedaan di kalangan rakyat Timor. Hal ini tidak mustahil terjadi karena adanya dua versi pandangan yang berkembang dalam menanggapi dua opsi pemerintah Indonesia dalam hal penyelesaian masalah Timtim ini. Kubu pertama datang dari kelompok pro integrasi (antara lain diwakili oleh Abilio Osorio, Abilio

Mariano dan Salvador Ximenes)³², menerima otonomi yang ditawarkan pemerintah secara final. Di lain pihak kubu referendum (Xanana cs) menginginkan otonomi sebagai tahapan selama beberapa periode tertentu menuju kemerdekaan Timtim³³. Dalam bahasa Uskup Belo, "Timtim butuh waktu 10-15 tahun untuk melakukan referendum setelah mendapatkan otonomi khusus"³⁴. Alasan penundaan referendum ini adalah untuk mempersiapkan masyarakat Timtim agar lebih mampu menyelenggarakan pemerintahan sendiri dan juga memberi kesempatan rakyat Timtim untuk menjadi tenang. Andaikata referendum dilaksanakan sekarang ada bahaya bahwa pemberian suara akan sangat emosional dan tidak mustahil bahwa antara yang pro dan anti integrasi timbul konflik berdarah lagi, termasuk juga kemungkinan ekses-ekses balas dendam sesudah referendum dilaksanakan³⁵.

Namun usulan ini secara tegas telah ditolak Indonesia. Pihak Indonesia yang telah mencanangkan penyelesaian Timor Timur pada 1 Januari 2000, menyatakan bahwa cara tersebut hanya akan memperpanjang masalah dan beban biaya ekonomi yang tidak sedikit bagi Indonesia. Di samping itu juga akan memberi kesempatan pada kelompok-kelompok yang bertikai untuk mempersiapkan diri. Oleh karena itu, Indonesia dan Portugal kemudian mencari suatu formula baru untuk mengetahui apakah rakyat Timor Timur menerima otonomi yang ditawarkan Indonesia atau tidak. Setelah melewati perundingan panjang, pada akhirnya di New York 12 Maret 1999 kedua negara menyepakati menggunakan metode pemungutan suara langsung (*direct vote*) yang akan disponsori PBB³⁶. Kesepakatan ini membuktikan akan sikap tanggung jawab Indonesia. Indonesia tidak akan begitu saja meninggalkan Timor Timur seperti halnya Portugal di masa lalu.

Sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut, maka RI-Portugal dalam pertemuan segi tiga di bawah naungan Sekjen PBB telah

³² *Kompas*, "Jose Alexandre Xanana Gusmao", 7 Februari 1999.

³³ *Kompas*, "Jose...", 7 Februari 1999.

³⁴ *The Jakarta Post*, "Bishop Belo appeals for international assistance", 1 Maret 1999.

³⁵ *Kompas*, "Rekonsiliasi di Timor Timur", 8 Desember 1998.

³⁶ *Kompas*, "Kesepakatan RI-Portugal: Pemungutan Suara Langsung di Timtim", 13 Maret 1999.

bergerak lebih jauh lagi untuk merealisasikan opsi-opsi yang ditawarkan Indonesia yaitu dengan mengambil langkah-langkah berikut. Pertama, 13-14 April 1999 pejabat senior kedua negara bertemu untuk membahas lebih lanjut paket otonomi khusus dan memerinci metode pemungutan suara langsung. Peremuan ini kemudian ditindaklanjuti pada pertemuan tingkat menteri pada 22-23 April 1999. Kedua, keputusan rakyat Timtim apakah menghendaki otonomi atau kemerdekaan diharapkan sudah diketahui pada Agustus 1999, atau setelah pemilu 7 Juni 1999. Ketiga, kalau sekiranya opsi pertama yang diterima yaitu otonomi, maka Indonesia masih bertanggungjawab dalam urusan keuangan dan politik luar negeri. Sebaliknya, Indonesia akan melepas Timtim jika wilayah ini menolak rencana otonomi dan meminta MPR untuk mencabut ratifikasi integrasi Timtim ke Indonesia. Jika kemudian Sidang Umum MPR menyetujuinya, maka Timtim berstatus sebagai negara merdeka. Untuk itu, maka Indonesia bermaksud mengembalikan status Timtim ke pangkal semula yaitu dibawah Portugal. Hal ini karena adalah Portugal yang dengan gigih memandang Timtim masih di bawah pemerintahannya (*administering power*) dan tidak pernah menyatakan Timtim telah menempuh proses dekolonisasi. PBB sejauh ini juga tidak mengakui integrasi Timtim ke dalam negara Indonesia sesuai dengan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 384 (1975) dan 389 (1976) yang menyatakan "Semua negara diminta menghormati integritas wilayah Timtim, juga hak rakyatnya untuk menentukan nasibnya sendiri", serta Resolusi 1514 (XV) bahwa "Pemerintah Indonesia diminta untuk secepatnya menarik pasukannya dari wilayah itu"³⁷. Dalam hal penyerahan kembali ke Portugal ini, berarti Indonesia menggugurkan klaimnya yang telah memasukkan Timtim sebagai wilayah kedaulatannya. Dalam kaitan itu, apabila PBB hendak secara kokoh mempertahankan proses dekolonisasi sebagaimana termaktub dalam resolusi-resolusinya, maka penuntasan masalah dengan cara itu sudah sepatutnya diterima PBB. Biaya dan proses selanjutnya tentulah kembali terserah kepada *administering power*.

Namun demikian, ini tidak berarti bahwa proses tersebut akan berjalan mulus karena kompleksitas penyelesaian cara tersebut pun

³⁷ Kompas, Rumitnya Urusan "penentuan Nasib Sendiri", 31 Jan 1999).

dapat berputar-putar. Portugal yang cerdas mungkin tidak akan begitu saja mau menerima pertanggungjawaban, apalagi dengan situasi keuangannya yang juga memburuk. Selain itu Indonesia pun merasakan beban moral yang berat, karena apa yang telah diputuskan sebagai wilayah kedaulatannya dengan seketika lalu melampirkan masalah itu kembali ke Portugal. Salah satu kesulitan yang dihadapi Indonesia apabila menempuh cara ini adalah Indonesia secara *implied* dapat diartikan sungguh-sungguh telah melakukan agresi dan invasi terhadap Timtim. Sehingga ada kemungkinan Portugal akan mendorong pihak Timtim untuk menuntut kompensasi terhadap tindakan Pemerintah RI "mencaplok" wilayah tersebut.

Melihat berbagai kemungkinan di atas, maka secara jelas dapat dikatakan bahwa prospek penyelesaian masalah Timtim ini tidak akan berjalan begitu mudah. Namun yang jelas apapun opsi yang ditawarkan oleh Indonesia, pada akhirnya harus tetap didasarkan pada penilaian bahwa opsi tersebut harus dapat menyelesaikan tiga lapis konflik yang satu sama lain saling terkait, yaitu konflik antar kelompok masyarakat Timtim sendiri, konflik kelompok perlawanan dengan Pemerintah RI dan konflik RI-Portugal.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka kewajiban dari semua pihak untuk bersama mengembalikan ketenangan politik, ketenangan sosial di kalangan masyarakat Timtim. Hal ini karena muara segala persoalan dan penyelesaian politik masalah Timor Timur sebenarnya berpulang kembali ke masyarakat itu sendiri. Sehingga sangat wajar kiranya apabila situasi di atas sangat diharapkan dapat tercipta di wilayah ini, agar dalam pemilihan langsung di bawah naungan PBB nanti mereka secara tenang dapat mengadakan pilihan dalam kerangka kebijakan otonomi atau kemerdekaan politik.

Ini merupakan bagian yang paling sulit dalam seluruh proses namun harus dilalui. Keberhasilan mereka menentukan nasibnya sendiri akan sangat membantu penyelesaian masalah Timtim secara tuntas. Dalam artian, apapun pilihan yang diambil oleh rakyat Timtim ini akan memberikan dampak positif, tidak saja bagi citra Indonesia namun juga sekaligus dapat menyelesaikan tiga lapis konflik dalam masalah Timtim secara damai.

Namun demikian satu hal yang patut digarisbawahi bahwa penyelesaian masalah Timtim dapat secara tuntas diselesaikan apabila semua pihak mampu menghargai apapun solusi akhir yang dicapai. Oleh karena persoalan Timtim tidak akan selesai, kalau semua keputusan yang sudah diambil tetap tidak diterima oleh pihak lainnya yang merasa kalah dalam penentuan pilihan tersebut. Untuk itu kedewasaan politik sangat dibutuhkan rakyat Timtim agar kedamaian terwujud di bumi Loro Sae ini.